

PERAN POLITIK DAN KEBIJAKAN TERHADAP MUTU GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN ISLAM

Abdul Rahim¹, Sukarno², Minna El Widdah³

Email: aabdulraahim@gmail.com

Abstrak

Kebijakan politik dalam pendidikan, seperti kewajiban belajar telah lahir di dalamnya baik Eropa atau Amerika Serikat dan Jepang setelah lahirnya demokrasi dalam kehidupan abad ke-19. Sementara itu, tidak mungkin bisa dikembangkan tanpa adanya anggota cerdas. Anggota yang paling cemerlang pun hanya bisa melalui pendidikan terbentuk. Pendidikan secara langsung maupun tidak langsung dipengaruhi oleh politik, baik dalam konteks makro dan mikro. Pendidikan dan integrasi politik bersifat jamak. Sedangkan melalui pendidikan dapat membentuk individu-individu yang berpartisipasi dalam kehidupan politik.

Kata Kunci: Politik, Kebijakan, Mutu Tenaga Kependidikan

A. Pendahuluan

Pelaksanaan pendidikan di Indonesia secara tegas diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pasal 29 termasuk amandemennya. Pendidikan menjadi tanggung jawab dan kewajiban negara dan didukung oleh seluruh rakyatnya. Namun hingga saat ini implementasi amanat tersebut belum sepenuhnya dapat dilaksanakan dalam bidang pendidikan, bahkan dirasakan masih sangat jauh dari yang dicita-citakan. Meskipun dari sisi pendanaan tahun 2009 pemerintah telah menargetkan anggaran 20% dari APBN.

Setelah pelaksanaan otonomi pendidikan sebagai konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah maka pengelolaan pendidikan tidak lagi sentralisasi dari pusat. Saat ini peran pemerintah daerah untuk memajukan pendidikannya menjadi sangat terbuka meskipun masing-masing daerah memiliki kesulitan baik masalah sumberdaya manusia maupun minimnya dana pendidikan.

Tantangan perkembangan dunia saat ini menuntut kemampuan sumber daya manusia yang tangguh dan memiliki kreativitas yang tinggi, tetapi bagaimana negara mampu menyiapkan SDM yang berkualitas tersebut masih mencari-cari pola hingga saat ini, H,A,R Tilaar (2003: 143) mengemukakan dua fungsi besar negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat banyak dan mempersatukan rakyat banyak tersebut dalam suatu wadah yang disebut negara.

Kaitan antara pendidikan dan politik sangat erat bahkan selalu berhubungan sehingga dengan keadaan tersebut dapat kita ketahui bahwa politik negara sangat

¹ Mahasiswa Program Pascasarjana UIN STS Jambi. Disamping mahasiswa PPS UIN STS Jambi yang bersangkutan juga berstatus sebagai guru PAI di SDN 051/IX Setiris Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi.

² Dosen Program Pascasarjana UIN STS Jambi.

³ Dosen Program Pascasarjana UIN STS Jambi.

berperan menentukan arah perkembangan pendidikan suatu negara. Tidak berlebihan kiranya bila banyak ahli yang berpendapat bahwa pendidikan sebagai salahsatu upaya atau sarana untuk melestarikan kekuasaan negara. Michael W.Apple dalam Tilaar (2003:145) menjelaskan bahwa politik kebudayaan suatu negara disalurkan melalui lembaga-lembaga pendidikannya sehingga dalam pendidikan tersalur kemauan-kemauan politik atau sistem kekuasaan dalam suatu masyarakat.

B. Pembahasan

Upaya menanamkan suatu prinsip, doktrin dan kesepakatan-kesepakatan negara melalui pendidikan dilakukan dengan cara yang tidak dapat ditelusuri secara sekilas karena biasanya berada secara implisit dalam suatu materi pendidikan atau kurikulum sehingga secara tidak sadar sbenarnya masyarakat yang mengikuti dan memperoleh pendidikan telah mendukung pula tjuan khusus negara tersebut.

Upaya untuk melestarikan kekuasaan negara secara umum dibedakan Tilaar(2003:145-146) dalambeberapa sistem atau pendekatan,yaitu:

- a. Moralisme Relegius, dalam pendekatan ini Negara memberikan arah kepada pendidikannya agar memlelihara nilai-nilai moral religius yang dianut oleh negara. Dalam sejarah pendidikan hal ini dikenal pada zaman scholastic.
- b. Masa aufklarung, munculnya intletualoisme mendorong Negara mengarahkan pendidikannya kepada pengembangan kemampuan berpikir yang merupakan dasar dari kemajuan. Intlektualisme merupakan tujuan utama dalam pendidikan yang diarahkan oleh negara.
- c. Perkembangan Nasionalisme, dengan lahirnya Negara-negara bangsa pada abad 19,terutama sesudah revolusi Prancis , maka pendidikan nasional merupakan tugas utama dari negara. Pendidikan warga negara dilaksanakan disekolah-sekolah dan mencapai puncaknya dalam pendidikan totailer seperti yang dislenggarakan oleh Nzisme,totalierisme,Fasisme, dan Kmunisme.
- d. Lahirnya demokrasi, hal ini dikenal terutama dalam falsafah pendidikan yang dikembangkan di Amerika Serikat oleh filsuf John Dewey, yang mengatakan bahwa pabial kita berbicara mengenai demokratis maka kita memasuki wilayah pendidikan. Pendidikan merupakan sarana bagi tumbuh dan berkembangnya sikap demokrasi. Oleh sebab itu pendidikan tidak dapat dilepaskan dari penyelenggaraan Negara yang demokratis.
- e. Pendidikan sebagai Pengembangan Sumber Daya manusia,pendekatan dari sudut ekonomi ini menunjukkan betapa pentingnya factor manusia dalam pengembangan ekonomi. Kehidupan ekonomi menjadi sangat penting dalam kehidupan bernegrara. Oleh sebab itu Negara wajib mengembangkan kemampuan semberdaya manusianya sebgai asset untuk perkembangan ekonominya. Pendekatan ini menjadi sangat populer dinegara-negara berkembang setelah perang dunia kedua.
- f. Pendekatan-pendekatan diatas mempunyai banyak kelemahan terutama dalam kelanjutan kehidupan suatu masyarakat.krisis ekonomi,krisis sosial yang terjadi akhir-akhir ini menunjukkan bahwa pendekatan diatas mempunyai kelemahan-kelemahan. Salahsatu pendekatan baru adalah pendekatan kapital sosial

merupakan suatu kekuatan yang menjamin adanya integrasi dalam suatu masyarakat atau Negara dan juga merupakan kekuatan ekonomi atau sumberdaya manusia dalam suatu masyarakat. Pendekatan kapital sosial menonjol dalam eraglobalisasi karena kecendrungan pupusnya rasa persatuan dan menurunnya rasa nasionalisme akibat sikap eksklusivisme kelompok, komersilisasi dan kehidupan santai dalam eraglobalisasi.

Pendekatan-pendekatan diatas semakin menyadarkan kita bahwa peran negara untuk rakyatnya terutama lewat pendidikan sedemikian besarnya. Tanggung jawab pembangunan pendidikan menjadi sangat berat dan itu merupakan tantangan tersendiri. Ditengah rendahnya ekonomi negara kita saat ini pembangunan pendidikan harusnya menjadi prioritas untuk dikembangkan, sudah bnayak bukti dinegara lain yang sudah maju dimana pengembangan sumberdaya manusia yang diprioritaskan tersebut dapat mendukung keberhasilan pembangunan secara keseluruhan. Sistem politik yang berlaku dalam satu negara senantiasa terkait dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh negara termasuk kebijakan dalam bidang pendidikan. Kaitan tersebut terletak pada:

- a. Perumusan kebijakan
- b. Proses legitimasi
- c. Proses penyampaian pada khalayak
- d. Proses pengkomunikasian
- e. Proses pelaksanaan, dan
- f. Proses evaluasi

Perbedaan perumusan kebijakan dinegara satu dengan yang lainnya seringkali disebabkan oleh perbedaan sistem politik yang dianut. Hal itu juga berlaku pada perbedaan pelaksanaan dan evluasi pada suatu negara.

Pendidikan sebagai wahana pembangunan politik. Keterkaitan antara pendidikan dan politik dipahami oleh masyarakat dalam dua hal, pertama ada kelompok masyarakat yang mengatakan bahawa pendidikan adalah pendidikan dan politik adalah politik antara keduanya terpisah. Kedua ada kelompok masyarakat yang berpendapat antara keduanya saling berkaitan.

Pendapat mana yang paing sesuai masih bisa diperdebatkan, pendapat yang pertama mengasumsikan bahwa mencampuradukkan antara pendidikan dan politik akan merugikan pendidikan karena didalam politik terdapat kondisi buruk atau jelek menurut pendapat kelompok masyarakat tertentu. Pendapat kedua cukup beralasan karena politik tidak dapat hanya dipahami dalam arti sempit, perlu diingat bahwa poitik dalam arti sempit diartikan sebgaiian masyarakat sebagai politik dalam percaturan kehidupan berbangsa dimana didalamnya terdapat persainagan antar kelompok atau golongan tertentu untuk memperebutkan suatu kedudukan atau posisi yang diinginkan dengan menghalalkan segala cara. Politik dalam bidang pendidikan sebenarnya ada, sebuah contoh ;seorang sekolah SMK yang memutuskan kebijakan tentang pola megang bagi siswa-siswanya, apakah keputusan itu tidak dapat dianggap sebagai sebuah keputusan politik, contoh lain adalah peraturan-peraturan tentang

pendidikan yang diputuskan pemerintah baik berupa kebijakan atau pedoman sebenarnya merupakan keputusan politik juga.

Hal itu beralasan karena sebelum sebuah peraturan tentang pendidikan diptuskan harus melalui pembahasan yang sangat sengit baik pada lembaga legslatif maupun eksekutif. Kita masih ingat bagaimana Undang-Undang no 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang tertunda penetapannya untuk waktu yang tidak sebentar hanya karena ada salah satu pasal yang menjadi perdebatan. Disnan terjadi tarik menarik antara berabagai kelompok dan itu merupakan sesuatu yang lazim dalam dunia politik.

Dari sedikit contoh diatas maka dapat kita simpulkan bahwa didalam dunia pendidikan politik juga berperan dan merupakan hal yang kurisal bukan sebagai pelengkapsaja. Hingga saat ini pandangan masyarakat masih menganggap bahwa ini hal pokok bagi kemajuan suatu bangsa adalah ekonomi dan politiknya. Hal itu tercermin dari pola pikir politikus kita yang selalu berorientasi pada dua bidang itu. Sangat jarang politikus yang memprioritaskan pada sektor pendidikan dalam agenda politiknya. Kondisi demikian juga terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, proritas pembangunan kita masih saja pada sector ekonomi, politik hankam, politik luar negeri dan belum pernah sampai pada wacana untuk memprioritaskan pada sector pendidikan. Hal demikian barang kali juga dipicu oleh pemahaman bahwa pendidikan tidak secara langsung dapat diketahui hasilnya dan memerlukan biaya yang sangat besar sedangkan sektor lainnya bisa dengan capat diketahui hasilnya. Pendidikan merupakan sebuah investasi, karena sebagai sebuah investasi tentu hasilnya tidak adapt diketahui dengan cepat. Sebenarnya kalau kita mau nengok kebelakang pada masa sebelum tahun 1945 disna kita akan menjumpai banyak tokoh besar yang membangun pondasi bangsa ini, bukan kah mereka adalah produk pendidikan yang berkualitas ?. para tokoh terdepan kita saat adalah orang yang orang-orang yang bersih dan tulus ikhlas mencurahkan segala kemampuannya untuk bangsa, apakah pada saat itu terbesit nanti setelah berhasil mewujudkan cita-cita bangsa indonesia mereka akan korupsi atau memanfaatkan posisinya?,kami kira tidak terlintas sedikitpun dalam diri mereka. Kondisi yang terjadi saat ini cukup memperhatikan, dimana terjadi kekerosotan dalam perilaku politik kita. Mochtar Buchori dalam sindhunata (2000:19-20) mengemukakan alasan kemerosotan proiode saat ini dalam perpolitikan dalam tiga generalisasi, yaitu:

- a. Perbedaan dalam perilaku politik disebabkan oleh perbedaan dalam mutu pendidikan dasar yang mereka terima sbelum mereka memasuki kehidupan politik, generasi Dr.Sutomo hingga soekarno mendapatkan pendidikan dasar yang sangat kuat yang mampu melahirkan kemampuan dan semangat intelektual yang tinggal bekal yang lengkap dan memadai sbgai landasan kehidupan politik dikemudian hari. Kondisi demikian tidak terjadi paska tahun 1945 dimana terjadi kemerosotan mutu pendidikan kita secara cepat sehingga tidak mampu menghasilkan seseorang yang tangguh dan profesional biukan sekedar figur semata.
- b. Perbedaan disebabkan karena politik sebelum kemerdekaan dihuni oleh “the educated minority”, yaitu kelompok anggota masyarakat moinoritas yang menhenyam pendidikan cukup tinggi, sedangkan paska kemeerdekaan dunia politik dikuasai oleh

golongan masyarakat yang relative kurang terdidik tetapi mampu menggalang dukungan dari masyarakat.

- c. Perbedaan dalam *Zeitgeist*, perbedaan dalam semangat zaman periode 1908-1945 sangat berbeda dengan zaman yang hidup dalam masyarakat kita dalam periode setelah kemerdekaan.

Dari berbagai generalisasi yang dismapaikan terlihat bahwa memang bukan sekedar pendidikan yang berpenagruh dalam perkembangan politik tetapi juga budaya yang berkembang pada suati waktu tersebut. Seberapa penting pendidikan dalam pembangunan politik menjadi sebuah pertanyaan yang menarik. Ada beberapa faktor yang menjadi alasan pentingnya pendidikan bagi pembangunan politik yaitu sebagai berikut:

- a. Pendidikan berlangsung pada lingkup formal, non-formal dan informal
- b. Pendidikan melatarbelakangi atau sebagai basic bagi seseorang dalam kehidupan politik
- c. Kondisi politik Yang kondusif dapat diciptakan oleh pelaku-pelaku politik yang profesional dan nbertanggung jawab.

Aktivitas pendidikan tidak hanya berlangsung pada sekiolah-sekolah formal saja, pada saat ini dimasyarakat masih menganggap bahwa sekolah adalah segalanya bagi pendidikan anak, padahal kondisinya tidak seperti itu. Jika kemudian mutu lulusan pendidikan formal rendah atau tidak seperti yang diharapkan maka sekolah dan gurunya yang dislahkan. Memang dalam pendidikan formal ditata sedemikian rupa baik kurikulum , fasilitas, tenaga, kependidikan, dan sebagainya untuk menunjang aktivitas pemebelajaran yang baik.

Berbicra tentang kaitan pendidikan dan politik, pada sekolah-sekolah formal kebijakan pendidikan sudah ditetapkan dari pusat walaupun kini sudah me;aksanakan otonomi pendidikan.

Itulah mengapa dapat dipahami bahwa pendidikan khususnya sekolah dapat menjadi alat penguasa untuk melanggengkan kekuasaannya dan juga dapat sebagi suatu tempat penanaman doktrin-doktrin tertentu. Apakah ada yang salah dalam pendidikan formal kita sehingga menghasilkan banyak politikus yang rendah moralnya dengan indikator banyaknya korupsi, kolusi, nepotisme, politik uang, dan sebagainya.

Pendidikan khususnya pendidkan formal disekolah merupakan tempat transfer pengetahuan tetapi juga sebagai tempat transfer nilai, nilai dalam hal ini sangat erat kaitannya dengan norma-norma dan segala sesuatu yang baik dimasyarakat. Saat ini banyak siswa sekolah yang sama sekali tidak menaruh hormat pada guru maupun orang tua, hal itu bisa kita lihat dengan sopan santun mereka, jarang ada anak usia sekolah yang leawat didepan orang tua kemudian minta permissi karena mereka dengan cueknya melintas. Pada beberapa dasawarsa terdahulu dimasyarakat kita tatakrama sangat kuat dipegang, tidak ada yang berani membantah orang tua, guru, dan sebagainya tetapi kini orang tua dismakan hanya sebagi teman dan guru demikian pula, padahal harusnya mereka dihormati. Bagaimana pendidikan dapt menanamkan nilai-nilai yang baik juga memerlukan dukungan semua pihak, diaykini kemerosotan moral salah satunya karena pendidikan tetapi faktor masyarakat dan budaya yang

berlaku juga menentukan. Banyak kendala dalam menanamkan nilai pada anak didik, antara lain:

- a. Nilai-nilai masih dianggap hanya sebagai pelajaran semata, siswa belum menghayati secara benar bahwa nilai-nilai itu merupakan sebuah aktivitas yang melekat dalam dirinya bukan sekedar materi yang bisa dipelajari dan setelah itu dilupakan
- b. Dukungan masyarakat disekitar anak didik tinggal yang belum maksimal bahkan rendah, penanaman nilai bagi anak dilingkungan pasar atau terminal tentu lebih sulit dibandingkan dengan penanaman nilai bagi anak-anak dipedesaan yang belum terlalu tersentuh perubahan.
- c. Guru kurang menguasai pola penanaman nilai yang tepat, banyak guru-guru kita yang belum dapat menempatkan perbedaan individu dalam diri anak didiknya sebagai sebuah sarana untuk pembelajaran. Guru masih saja menyamaratakan segala yang diberikan kepada siswanya. Memang untuk mengetahui karakter dan sifat anak masing-masing banyak kendalanya tetapi secara garis besar pasti guru mengetahui karena ia bertemu setiap hari dengan siswanya.

Demikian kendala yang menghingapi dalam penanaman nilai bagi siswa-siswa dilembaga pendidikan formal. Apabila pendidikan nilai dapat berlangsung dengan baik maka setelah siswa atau anak didik nantinya berada dimasyarakat ia telah memiliki suatu pola nilai yang baik, kondisi demikian juga berlaku dalam kancah politik dimana politikus dengan penguasaan nilai yang baik mereka dalam tradisi politiknya ia juga akan menjalankan pola yang baik pula.

Pada pendidikan non-formal atau diluar persekolahan pendidikan politik dapat dilakukan pada aspek penanaman keterampilan berperilaku yang baik dimasyarakat. Kurikulum dalam pendidikan non-formal seyogyanya diarahkan untuk transfer nilai juga. Sedangkan pada pendidikan informal penanaman nilai yang baik sebenarnya banyak terjadi pada tahap ini. Seorang anak atau siswa sekolah dasar hanya 6-8 jam berada disekolah atau pendidikan formal sedangkan sisa waktu yang lain ada dirumah atau masyarakat. Pendidikan informal terjadi pada keluarga, masyarakat, organisasi, dan sebagainya.

Penanaman nilai pendidikan informal lebih mungkin dilakukan, tetapi kendalanya juga lebih besar, antara lain:

- a. Dersanya arus informasi lewat televisi yang secara nyata memberi efek yang kurang baik bagi anak, anak lebih cepat meresapi apa yang mereka lihat dibandingkan apa yang mereka dengar sehingga walaupun segala sesuatu ditelvisi adalah fiktif mereka akan menerimanya sebagai kenyataan. Kondisi itu mengakibatkan pola tingkah laku anak juga menjadi sedemikian susah dikendalikan dan itu membentuk pola kehidupannya.
- b. Globalisasi informasi lewat internet, sudah tidak ada lagi jarak antara negara didunia karena lewat internet semua mungkin, saat ini anak usia sekolah dasar sudah memanfaatkan internet tetapi apa yang mereka lakukan dapat dikontrol, hal itu berkaitan dengan budaya masyarakat yang ada dimana informasi baik dan buruk dari seluruh dunia dapat diketahui saat itu juga.

- c. Orang tua sudah tidak mampu memberi contoh dan teladan yang baik bagi anak-anaknya, orang tua sudah sibuk mencari uang bagi kehidupan keluarga sehingga mereka kadang sudah kehilangan identitas yang dicontoh bagi anak-anaknya. Guru yang terbaik adalah teladan masih berlaku hingga kini dan itu bukan merupakan slogan kosong belaka. Anak yang selalu melihat teladan orang tua yang baik ia akan tergerak untuk mengikuti pola itu dan itu merupakan keuntungan tersendiri apabila kita dapat mengelolanya
- d. Lemahnya kontrol orangtua, karena kesibukan orang tua maka pergaulan anak tidak atau kurang terkontrol. Harus disadari bahwa lingkungan merupakan factor dominant yang membentuk perilaku anak, seperti contoh diatas bahwa anak yang hidup dilingkungan terminal mereka akan terbiasa dengan perilaku kasar dan suka teriak-teriak jorok misalnya, ini berlainan dengan anak yang tinggal dipedesaan mereka masih menjunjung tinggi gotong-royong, saling menghargai dan sopan meskipun tidak seluruhnya seperti ini. Kontrol orang tua bukan sekedar penjaga yang secara otoriter mengawasi anak-anaknya tetapi lebih dari itu ia harus mampu memberi argumentasi yang tepat tentang segala sesuatu dalam lingkungan sekitarnya.
- e. Lemahnya kontrol sosial, kehidupan sosial masyarakat kita saat ini adalah masyarakat persiangan sehingga sikut-menyikut merupakan hal yang lazim dijumpai. Kontrol sosial yang terjadi juga sangat lemah karena investasi dan pola perubahan sosial yang begitu cepat sehingga kontrol yang diharapkan tidak atau kurang mampu berperan dengan baik. Perangkat hukum yang menjadi penjamin keadilan hingga kini masih sebatas perangkat yang belum dapat dilaksanakan dengan baik sehingga terjadi berbagai ketimpangan sosial sebagai dampak ketidakadilan dimasyarakat, bangsa dan Negara.

Melalui pendidikan yang baik akan menciptakan politikus yang bijaksana atau dalam istilah Mochtar Buchori sebagai karifan yang dapat dicapai lewat berpikir reflektif. Selanjutnya Mochtar Buchori dalam Sindhunata(2000:25) menyampaikan syarat manusia menjadi arif yaitu:

- a. Pengetahuan yang luas (to be learned)
- b. Kecerdikan (Smartness)
- c. Akal sehat(common sense)
- d. Tilikan (insight), mengenal inti hal yang diketahui
- e. Sikap hati-hati (prudence, diskrete)
- f. Pemahaman terhadap norma-norma kebenaran
- g. Kemampuan mencernakan(to digest) pengalaman hidup.

Kearifan dan kebijaksanaan dapat dibentuk sejak dini dalam diri anak, karena sifatnya yang melekat maka kedua hal itu kurang bisa diukur tingkatannya tetapi dapat dirasakan dan dilihat hasil atau produk yang diperoleh. Selanjutnya berbicara kebijaksanaan kita akan terlintas tentang demokrasi.

Perkembangan demokrasi sangat dipengaruhi oleh pendidikan. Tilaar (2003:474-476) mengidentifikasi empat masa atau gelombang proses demokrasi, yaitu:

- a. Demokrasi dan desentralisasi
- b. Demokrasi dan partisipasi
- c. Demokrasi dan pemberdayaan, empowerment
- d. Demokrasi dan Good Governance

Demokrasi dalam pendidikan lebih ditekankan setelah pelaksanaan otonomi pendidikan sebagai implikasi otonomi daerah beberapa waktu lampu. Pola-pola demokrasi dalam pendidikan sebenarnya merupakan salah satu bentuk pendidikan politik dimana didalam demokrasi terdapat musyawarah, saling menghargai pendapat dan sebagainya. Upaya untuk memperluas dukungan pendidikan terhadap pembangunan politik dapat dilakukan melalui berbagai cara, yaitu:

- a. Menyusun kurikulum yang mampu secara komprehensif memberikan manfaat bagi anak didik dalam kehidupan dimasyarakat dan politik nantinya.
- b. Menciptakan pola hubungan yang baik antara pendidikan dan politik tetapi dalam koridor pendidikan bukan sekedar politisasi pendidikan.
- c. Membentuk guru yang memiliki kemampuan profesional dan berkarakter kebangsaan sehingga dapat sebagai figure yang baik bagi anak didik.
- d. Penanaman nilai-nilai yang baik sejak dini sehingga kepribadian anak dapat terbentuk secara nyata, tidak ada segala sesuatu yang bersifat instant mampu memberikan hasil yang baik sehingga segala sesuatu harus dipersiapkan sejak dini.

Pembangunan sebagai suatu proses berkesinambungan mencakup seluruh aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial budaya, politik dan sebagainya. John C. Bock dalam Zamroni (2000:2) mengidentifikasi peran pendidikan sebagai berikut: a) memasyarakatkan ideologi dan nilai-nilai sosio-kultural bangsa, b) mempersiapkan tenaga kerja untuk memerangi kemiskinan, kebodohan, dan mendorong perubahan sosial, dan c) meratakan kesempatan dan pendapatan.

Selanjutnya Zamroni (2000:3-5) mengemukakan peranan pendidikan dalam pembangunan nasional suatu bangsa dan berkaitan dengan pengambilan keputusan dan kebijakan pendidikan berdasar pada dua paradigma, yaitu:

- a. Paradigma fungsional, yang melihat kemiskinan dan keterbelakangan dikarenakan masyarakat tidak memiliki cukup penduduk yang memiliki pengetahuan, kemampuan dan sikap modern
- b. Paradigma sosialisasi, yang melihat peranan pendidikan dalam pembangunan adalah: mengembangkan kompetensi individu dan meningkatkan kemampuan warga masyarakat secara keseluruhan.

C. Penutup

Pendidikan bukan alat politik tetapi adalah pendidikan dan sebaliknya pendidikan yang tidak dapat memilih bukan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan negara. (memilih dalam hal ini adalah kebijakan-kebijakan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan negara). Disisi lain supermasi hukum dapat tercapai lewat pendidikan, pendidikan politik. Tujuan negara Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat dengan sistem politik yang berkedaulatan rakyat. Masyarakat Indonesia yang bhineka yaitu terbentuknya masyarakat yang terdidik yang telah memiliki suatu pandangan yang luas (sebagian besar dikota) yang dibentuk oleh pendidikan dan kesempatan. Pendidikan terletak dalam tatanan politik.

Sementara itu sentralistik/ kekuasaan terpusat menimbulkan dominasi kelompok yang imbasnya adalah pemiskinan sebagai akibat dari kontrol bukan pada masyarakat luas sehingga penguasa menjadi tidak terjangkau oleh hukum. Pendidikan adalah metode yang paling fundamental dalam kemajuan sosial dan reformasi. Reformasi yang dipaksakan akan gagal. Pendidikan merupakan sarana menumbuhkan demokrasi. Contoh: grakan reformasi yang berkesinambungan (sustainable) hanya dapat terlaksana apabila terdapat kesinambungan antara generasi sekarang dan generasi penerus (hanya dengan pendidikan).

Daftar Pustaka

- Ali Imron. (1996). *Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia*. Yogyakarta: Bumi Aksara.
- H.A.R.Tilaar. (2003). *Kekuasaan dan pendidikan*. Magelang: Indonesia Tera.
- Mansour Fakhri. (2001). *Sesat Pikir Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Yogyakarta: Insist/Pustaka pelajar.
- Mastuhu. (2004). *Menata Ulang pemikiran sistem pendidikan Nasional dalam Abad 21*. Yogyakarta: Safiria Insania Press.
- Munro. R. G. (1977). *Innovation Successor Failure?*. Bristol: J. W. Arrowsmith Cambridge English Dictionary
- Sindunata, Editor. (2000), *Menggagas Paradigma baru pendidikan*, Yogyakarta: Kansius.
- Wayne K.Hoy and Cecil G.Miskel. (2001). *Education Administration*. New York: Mc Graw Hill.
- Zamroni. (2000). *Paradigma Pendidikan Masa Depan*. Yogyakarta: Bigraf Publishing.